

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
UPAH MINIMUM KABUPATEN, DAN TINGKAT
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

HELENA ANGEL LIKHA

40122133

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
UPAH MINIMUM KABUPATEN, DAN TINGKAT
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

HELENA ANGEL LIKHA

40122133

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helena Angel Likha

NIM : 40122133

Judul Skripsi : **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Mei 2026

takan,



Helena Angel Likha

NIM.40122133

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Helena Angel Likha

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Helena Angel Likha

Nim : 40122133

Judul Skripsi : **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Hendri Hermawan Adinugraha,
M.S.I

NIP. 198703112019081001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan **mengesahkan** skripsi Saudari:

Nama : **Helena Angel Likha**

NIM : **40122133**

Judul : **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024.**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).
Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.

NIP 197806162003121003

Penguji II

Dr. Bahtiar Effendi, M.E.

NIP 198510012019081001



Dr. H. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.

NIP 197806162003121003

MOTTO

“Hidup tidak selalu tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi belajar menerima apa yang telah ditetapkan”

-Hamka-



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya, bapak Cayo dan ibu Sutiyah, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan pengrobanan yang tidak pernah bisa tergantikan, serta tidak pernah mengenal kata lelah untuk mengusahakan segalanya bagi putri bungsunya.
2. Kedua kakak kandung saya, mba Tika Nelia dan mba Lintang Pertiwi yang selalu memberikan semangat, saran, motivasi, dan dukungan yang tiada hentinya untuk adik kecilnya.
3. Almamater saya Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, SEI., M.Si yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Wali Bapak M. Aris Safi'i, M.E.I yang tiap semester selalu memberikan nasihat dan saran kepada saya agar dapat menyelesaikan studi ini.
6. Pemilik NIM 40122127 yang telah kebersamai dari awal masa perkuliahan hinga sekarang, yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

7. Teman-teman sab'ah dan teman-teman seperjuangan program studi ekonomi syariah angkatan 2022, terimakasih atas dukungan dan do'a baiknya.
8. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan sejauh ini, melewati berbagai proses, tekanan, rasa lelah, kecewa, dan keraguan selama perjalanan menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun keadaan tidak selalu mudah.



ABSTRAK

LIKHA, HELENA ANGEL. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

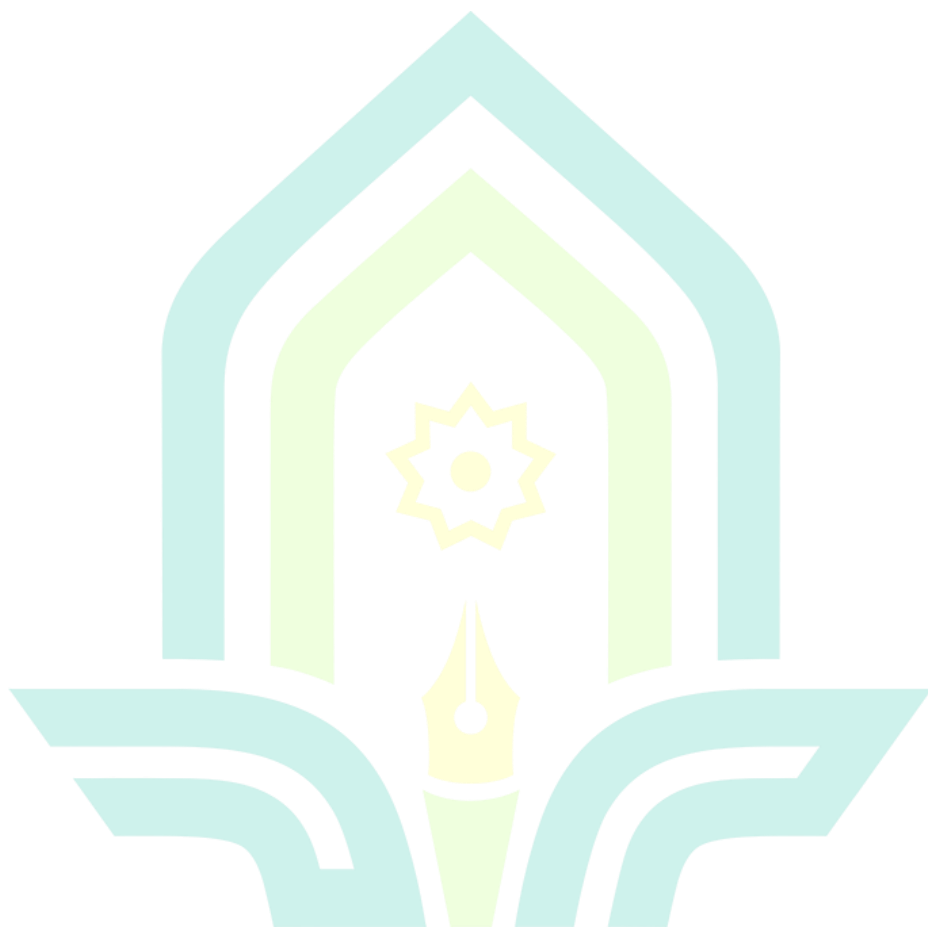
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai ukuran untuk menilai kemajuan dalam pembangunan manusia dengan mengkaji bidang-bidang utama, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks ini mencerminkan pencapaian di bidang kesehatan, pendidikan, dan penyediaan standar hidup yang layak. Kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, termasuk Produk Regional Bruto (PRB), upah minimum yang berlaku di setiap kabupaten, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dapat memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengingat keragaman lanskap ekonomi dan dinamika pasar tenaga kerja di seluruh kabupaten di Jawa Tengah, penelitian mengenai bagaimana unsur-unsur tersebut memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia menjadi perlu dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *Random Effect Model* (REM) yang diolah menggunakan software EViews. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan variabel independennya meliputi Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional Bruto signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia dengan nilai signifikansi 0,0000, sedangkan Upah Minimum Kabupaten juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,0001. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia dengan nilai signifikansi 0,8770. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara bersama-

sama memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Partisipasi Angkatan Kerja.



ABSTRACT

LIKHA, HELENA ANGEL. The Influence of Gross Regional Domestic Product, County Minimum Wage and Labor Force Participation Rate on the Human Growth Index in Counties In Central Java Province 2021-2024.

The Human Development Index (HDI) serves as a measure to assess progress in human development by examining key areas, including health, education, and standard of living. This index reflects achievements in health, education, and the provision of a decent standard of living. Economic conditions and labor market conditions—including Regional Gross Product (RGP), the minimum wage in effect in each regency, and labor force participation rates—can influence the Human Development Index (HDI). Given the diversity of economic landscapes and labor market dynamics across all regencies in Central Java, research into how these factors influence the Human Development Index is necessary.

The study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) Province of Central Java. The analytical method used is the regression of panel data with a Random Effect Model (REM) model processed using EViews software. The dependent variable in this study is the Human Development Index, while its independent variables include Gross Regional Domestic Product, County Minimum Wage and Labor Force Participation Rate.

The results of the study showed that partially Gross Regional Domestic Product was significant to Human Growth Index with a significance value of 0.0000, while District Minimum Wage also had a significant effect with a significance of 0,0001. Meanwhile, the Labor Force Participation Rate has no significant effect on the Human Growth Index with a significance value of .8770. Simultaneously, all three variables have a significant effect on the Human Growth Index with Prob (F-statistic) value of 0.000000. These findings indicate that the combination of Gross Regional Domestic Product, County Minimum Wage and Labor Force Participation Rate together influence Human Development Index in Counties in Central Java Province.

Keywords: Human Development Index, Gross Regional Domestic Product, Minimum Wage, Labor Force Participation.

KATA PENGANTAR

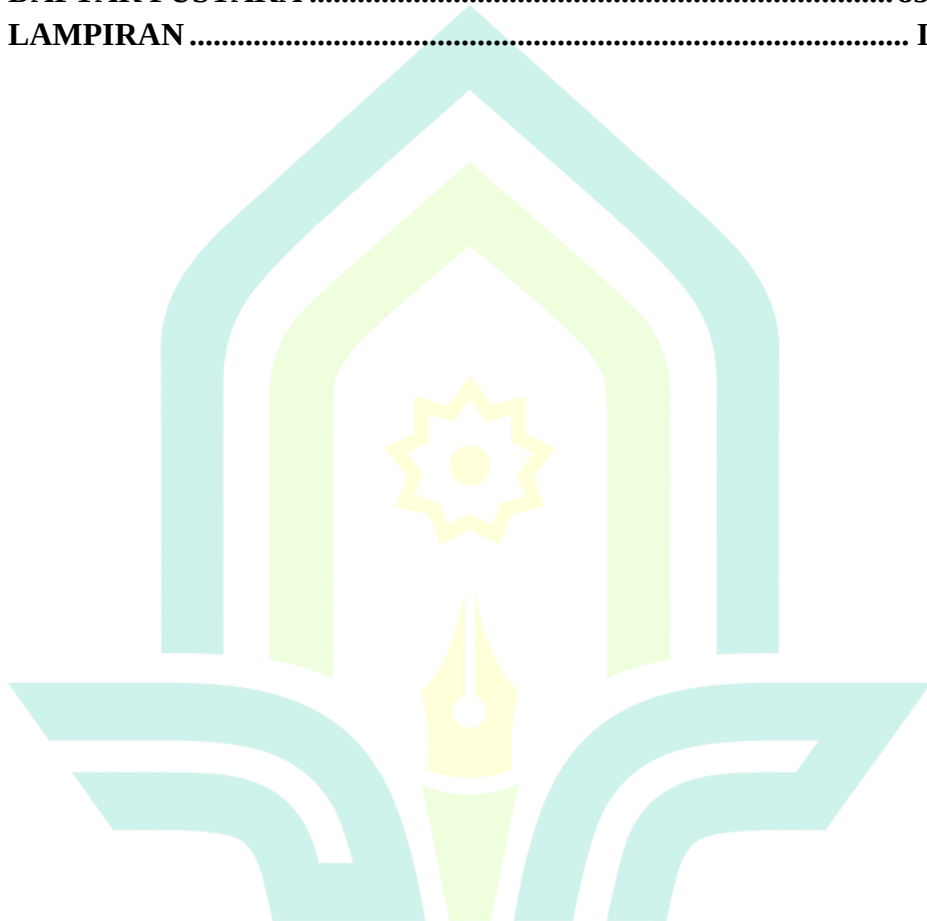
Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Aris Safi'I, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta Dosen Penasehat Akademik (DPA)
5. Bapak Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, SEI., M.E.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M. dan Bapak Muh Izza, M.S.I. selaku dosen penguji.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Landasan Teori	16
B. Telaah Pustaka.....	29
C. Kerangka Berpikir	39
D. Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Setting Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Variabel Penelitian	45
E. Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisis Data	47
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	53

A. Deskripsi Data	53
B. Analisis Data	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	I



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ...	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

*Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an*

1. Tajwid

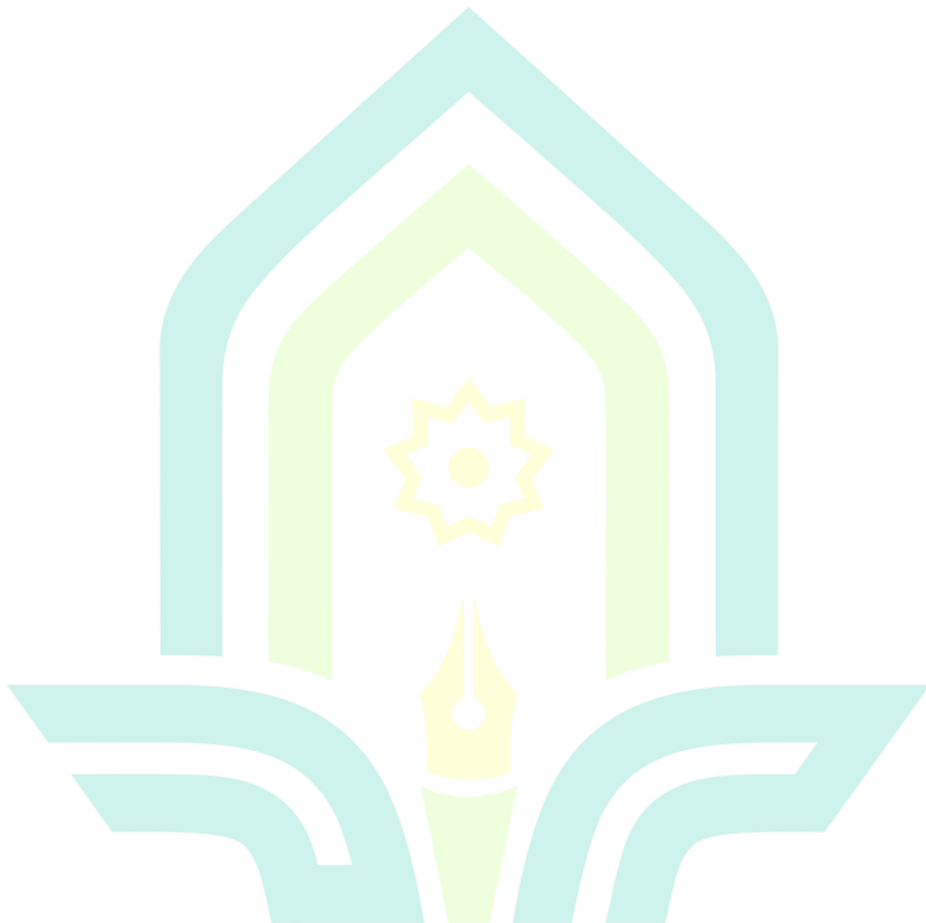
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.....	2
Tabel 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.....	3
Tabel 1. 3 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.....	6
Tabel 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024.....	10
Tabel 2. 1 Telaah Pustaka	30
Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir	39
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	45
Tabel 4. 1 IPM pada kabupaten di provinsi Jawa Tengah 2021-2024	53
Tabel 4. 2 PDRB pada kabupaten di provinsi Jawa Tengah 2021-2024.....	55
Tabel 4. 3 Table UMK pada kabupaten di provinsi Jawa Tengah 2021-2024.....	57
Tabel 4. 4 Tabel TPAK pada kabupaten di provinsi Jawa Tengah 2021-2024	59
Tabel 5. 1 Statistik Deskriptif Data	61
Tabel 5. 2 Hasil regresi data panel menggunakan <i>Common Effect Model</i>	61
Tabel 5. 3 Hasil regresi data panel menggunakan <i>Fixed Effect Model</i>	62
Tabel 5. 4 Hasil regresi data panel menggunakan <i>Random Effect Model</i>	63
Tabel 5. 5 Hasil Uji <i>Chow</i>	64
Tabel 5. 6 Hasil Uji <i>Husman</i>	65
Tabel 5. 7 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	65
Tabel 5. 8 Hasil regresi data panel menggunakan <i>Random Effect Model</i>	66
Tabel 5. 9 Hasil Uji Normalitas dengan <i>Random Effect Model</i>	69

Tabel 5. 10 Hasil Uji Multikolinearitas dengan <i>Random Effect Model</i>	69
Tabel 5. 11 Hasil Uji Parsial dengan <i>Random Effect Model</i>	70
Tabel 5. 12 Hasil Uji Simultan dengan <i>Random Effect Model</i>	71
Tabel 5. 13 Hasil Uji Koefisien Determinan dengan <i>Random Effect Model</i>	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Variabel Independen dan Dependen.....	I
Lampiran 2 Statistik Deskriptif Data.....	V
Lampiran 3 Hasil regresi data panel menggunakan Common Effect Model	VI
Lampiran 4 Hasil regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model.....	VI
Lampiran 5 Hasil regresi data panel menggunakan Random Effect Model	VII
Lampiran 6 Hasil Uji Chow	VIII
Lampiran 7 Hasil Uji Husman.....	VIII
Lampiran 8 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	VIII
Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas dengan Random Effect Model	IX
Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas dengan Random Effect Model.....	IX
Lampiran 11 Hasil Uji Parsial dengan Random Effect Model	X
Lampiran 12 Hasil Uji Simultan dengan Random Effect Model	X
Lampiran 13 Hasil Koefisien Determinan dengan Random Effect Model	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi permasalahan pokok dalam pembangunan daerah di Indonesia, pembangunan tak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif Islam, pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek material, tapi juga mencakup dimensi spiritual dan kemakmuran manusia secara menyeluruh (*falah*). Islam memandang jika tujuan pembangunan ialah mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pembangunan manusia yang memposisikan manusia sebagai pusat pembangunan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Ayat tersebut menegaskan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerataan pembangunan antarwilayah. dikarenakan itu keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga dari kemampuan suatu daerah dalam menaikkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata. IPM menjadi ukuran komprehensif untuk memperlihatkan taraf sebuah wilayah berhasil menaikkan kesejahteraan penduduk lewat dimensi kesehatan, pendidikan, standar hidup layak (Mailadani & Rosintan, 2024). Di Jawa Tengah meskipun beberapa

kabupaten/kota telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, masih terdapat daerah yang tertinggal dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tabel IPM Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Cilacap	70,42	70,99	71,83	72,38	71,40
Banyumas	72,44	73,17	73,86	74,52	73,49
Purbalingga	69,15	69,54	70,24	70,69	69,90
Banjarnegara	67,86	68,61	69,14	69,60	68,80
Kebumen	70,05	70,79	71,37	71,93	71,03
Purworejo	72,98	73,60	74,28	75,11	73,99
Wonosobo	68,43	68,89	69,37	69,82	69,12
Magelang	70,12	70,85	71,45	71,99	71,20
Boyolali	74,40	74,97	75,41	75,96	75,18
Klaten	76,12	76,95	77,59	78,16	77,20
Sukoharjo	77,13	77,94	78,65	79,30	78,25
Wonogiri	70,49	71,04	71,97	72,55	71,51
Karanganyar	75,99	76,58	77,31	78,11	76,99
Sragen	74,08	74,65	75,10	75,53	74,84
Grobogan	70,41	70,97	71,49	72,02	71,22
Blora	69,37	69,95	70,63	71,39	70,33
Rembang	70,43	71,00	71,89	72,53	71,46
Pati	72,28	73,14	73,59	74,10	73,27
Kudus	75,16	75,89	76,71	77,22	76,24
Jepara	72,36	73,15	73,85	74,32	73,42
Demak	72,57	73,36	74,07	74,57	73,64
Semarang	74,24	74,67	75,13	75,67	74,94
Temanggung	69,88	70,77	71,33	71,87	70,96
Kendal	72,50	73,19	73,86	74,34	73,47
Batang	68,92	69,45	70,20	70,74	69,52
Pekalongan	70,11	70,81	71,40	71,84	71,04
Pemalang	66,56	67,19	68,03	68,55	67,58
Tegal	68,79	69,53	70,23	70,77	69,83
Brebes	66,32	67,03	67,95	68,46	67,44
Kota Magelang	79,43	80,39	81,17	82,15	80,78

Kota Surakarta	82,62	83,08	83,54	84,40	83,41
Kota Salatiga	83,60	84,35	84,99	85,72	84,66
Kota Semarang	83,55	84,08	84,43	85,25	84,37
Kota Pekalongan	75,40	75,90	76,71	77,22	76,30
Kota Tegal	75,52	76,15	77,02	77,43	76,53

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2026)

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa perbedaan taraf kematangan pembangunan tercermin dalam variasi IPM di beragam kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Umumnya, pusat-pusat perkotaan memiliki IPM yang lebih tinggi dibanding dengan kabupaten, yang cenderung lebih berorientasi pada pertanian serta menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur dan ketersediaan layanan publik. Perbedaan-perbedaan ini mengindikasikan distribusi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan yang tidak merata, sekaligus menyoroti kesenjangan yang terus berlanjut dalam kualitas hidup yang dialami oleh berbagai komunitas di daerah. Akibatnya, diperlukan perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor penentu yang memengaruhi pembangunan manusia di wilayah kabupaten. Pembangunan tak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Bagian dari unsur pokok yang sering dikaitkan dengan pencapaian IPM ialah output ekonomi sebuah wilayah, yang dinilai secara kuantitatif melalui PDRB. PDRB ialah bagian dari faktor yang diterapkan guna melihat taraf aktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Berikut disajikan data PDRB Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah:

**Tabel 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024**

NO	KABUPATEN	2021	2022	2023	2024
1	Cilacap	55.74	60.883	65.976	67.203
2	Banyumas	31.789	34.711	37.609	40.236
3	Purbalingga	26.232	28.347	30.38	32.232
4	Banjarnegara	22.256	24.114	25.972	27.685

5	Kebumen	21.694	23.63	25.602	27.304
6	Purworejo	25.311	27.326	29.416	31.224
7	Wonosobo	22.377	24.023	25.646	27.206
8	Magelang	26.125	28.367	30.551	32.6
9	Boyolali	32.614	35.909	39.184	41.699
10	Klaten	33.371	36.523	39.902	42.732
11	Sukoharjo	42.649	46.323	49.834	53.022
12	Wonogiri	29.276	32.152	35.164	37.816
13	Karanganyar	41.617	45.446	49.366	53.148
14	Sragen	40.809	44.69	48.677	52.175
15	Grobogan	19.674	21.506	23.284	24.908
16	Blora	30.316	34.565	35.191	36.598
17	Rembang	30.908	33.758	36.546	38.792
18	Pati	34.122	37.245	40.281	43.092
19	Kudus	126.948	132.334	138.746	145.62
20	Jepara	26.783	28.981	31.152	32.894
21	Demak	22.768	24.643	26.615	28.313
22	Semarang	48.793	52.845	56.706	60.274
23	Temanggung	28.462	30.837	33.267	35.5
24	Kendal	43.937	47.728	51.628	55.273
25	Batang	28.571	31.055	33.635	36.295
26	Pekalongan	24.437	26.08	27.96	29.786
27	Pemalang	18.465	19.876	21.228	22.652
28	Tegal	23.141	24.946	26.852	28.556
29	Brebes	24.525	26.557	28.147	30.04

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026)

Mengacu dari Tabel 1.2 terlihat jelas bahwa angka PDRB untuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan perbedaan di setiap wilayah. Perbedaan ini mengindikasikan ketimpangan tingkat aktivitas ekonomi yang berbeda-beda di antara wilayah-

wilayah tersebut, yang dapat memengaruhi tingkat pembangunan manusia di setiap wilayah. Contoh di kabupaten Kudus dengan PDRB paling tinggi dikarenakan di wilayah tersebut terdapat aktivitas industri tembakau yang sangat besar contohnya perusahaan Djarum yang mampu memberikan pemasukan dan menambah nilai ekonomis untuk warga sekitar karena dapat ikut andil dalam proses produksi sehingga warga Kudus mampu mendapatkan penghasilan dari kegiatan produksi tersebut. Berbanding terbalik dengan kabupaten Pemalang dengan PDRB terendah di Provinsi Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya pergi merantau ke kota besar yang ada di Indonesia, menurut data BPS Kabupaten Pemalang sebanyak 64,28% penduduk pemalang meninggalkan tanah kelahirannya untuk bekerja diluar dengan potensi tingkat partisipasi angkatan kerja yang ada di pemalang sebesar 72,24%, data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Pemalang dengan usia produktif tidak menetap di Pemalang sehingga potensi yang ada didalam Pemalang itu sendiri tidak tergali dengan baik yang menyebabkan nilai PDRB di kabupaten Pemalang menjadi yang terendah seProvinsi Jawa Tengah.

PDRB berfungsi sebagai ukuran produksi agregat barang dan jasa di wilayah geografis tertentu, sehingga mencerminkan tingkat keterlibatan ekonominya. Secara teoritis, wilayah dengan tingkat PDRB yang tinggi diasumsikan memiliki daya tampung anggaran yang lebih luas untuk penyediaan fasilitas umum, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 Izzah & Hendarti (2021) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM. Kesimpulan ini diperkuat oleh penelitian Gede (2024) yang juga menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara PDRB dan IPM. Sebagai dukungan lebih lanjut, sebuah studi oleh Maulana et al. (2022) juga melaporkan adanya dampak positif yang signifikan dari PDRB terhadap IPM. Melengkapi

temuan-temuan ini, penelitian Egary & Sofyan (2024) juga menyimpulkan bahwa PDRB memiliki efek positif yang signifikan terhadap IPM. Namun, perspektif yang bertolak belakang muncul dari penelitian Mariana & Nabila (2021) yang mengidentifikasi adanya efek negatif yang signifikan dari PDRB terhadap IPM. Penelitian-penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa PDRB terbukti memengaruhi IPM, dengan efek yang bisa bersifat positif maupun negatif.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan juga menjadi aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu kebijakan yang memiliki peran strategis dalam bidang ketenagakerjaan adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Upah minimum kabupaten mempunyai korelasi yang erat dengan kesejahteraan masyarakat karena pendapatan yang diterima pekerja akan memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Semakin tinggi tingkat upah yang diterima masyarakat, maka daya beli masyarakat cenderung meningkat sehingga kualitas hidup masyarakat juga dapat mengalami peningkatan. Di Jawa Tengah sendiri nilai UMK pada Kabupaten cenderung meningkat setiap tahunnya, akan tetapi masih ada beberapa kabupaten yang memiliki UMK rendah yang berarti masih adanya ketimpangan antar daerah. Berikut disajikan data UMK pada Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024:

Tabel 1. 3 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024

NO	KABUPATEN	2021	2022	2023	2024
1	Cilacap	2.228.904,00	2.230.731,50	2.383.090,46	2.479.106,00
2	Banyumas	1.970.000,00	1.983.261,84	2.118.123,64	2.195.690,00
3	Purbalingga	1.988.000,00	1.996.814,94	2.130.980,94	2.195.571,00
4	Banjarnegara	1.805.000,00	1.819.835,17	1.958.169,69	2.038.005,00
5	Kebumen	1.895.000,00	1.906.781,84	2.035.890,04	2.121.947,00

6	Purworejo	1.905.400,00	1.911.850,80	2.043.902,33	2.127.641,00
7	Wonosobo	1.920.000,00	1.931.285,33	2.076.208,98	2.159.175,00
8	Magelang	2.075.000,00	2.081.807,18	2.236.776,91	2.316.890,00
9	Boyolali	2.000.000,00	2.010.299,30	2.155.712,29	2.250.327,00
10	Klaten	2.011.514,91	2.015.623,36	2.152.322,94	2.224.012,00
11	Sukoharjo	1.986.450,00	1.998.153,18	2.138.247,70	2.215.482,00
12	Wonogiri	1.827.000,00	1.839.043,99	1.968.448,32	2.047.500,00
13	Karanganyar	2.054.040,00	2.064.313,20	2.207.483,64	2.288.366,00
14	Sragen	1.829.500,00	1.839.429,56	1.969.569,00	2.049.000,00
15	Grobogan	1.890.000,00	1.894.032,10	2.029.569,04	2.116.516,00
16	Blora	1.894.000,00	1.904.196,69	2.040.080,17	2.101.813,00
17	Rembang	1.861.000,00	1.874.322,05	2.015.927,08	2.099.689,00
18	Pati	1.953.000,00	1.968.339,04	2.107.697,44	2.190.000,00
19	Kudus	2.290.995,33	2.293.058,26	2.439.813,98	2.516.888,00
20	Jepara	2.107.000,00	2.108.403,11	2.272.626,63	2.450.915,00
21	Demak	2.511.526,00	2.513.005,89	2.680.421,39	2.761.236,00
22	Semarang	2.302.797,59	2.311.254,15	2.480.988,00	2.582.287,00
23	Temanggung	1.885.000,00	1.887.832,11	2.027.569,32	2.109.690,00
24	Kendal	2.335.735,00	2.340.312,28	2.508.299,90	2.613.573,00
25	Batang	2.129.117,00	2.132.535,02	2.282.025,72	2.379.702,00
26	Pekalongan	2.084.155,14	2.094.646,19	2.247.345,90	2.334.886,00
27	Pemalang	1.926.000,00	1.940.890,41	2.081.783,00	2.156.000,00
28	Tegal	1.958.000,00	1.968.446,34	2.106.237,58	2.191.161,00
29	Brebes	1.866.722,90	1.885.019,39	2.018.836,92	2.103.100,00

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026)

Dari Tabel 1.3 yang disajikan memperlihatkan bahwa besaran upah minimum kabupaten di berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan variasi yang cukup besar serta tren kenaikan yang konsisten setiap tahun. Perbedaan tingkat upah minimum ini menandakan adanya tingkat ketimpangan tingkat pendapatan tenaga kerja antar daerah.

Kabupaten-kabupaten yang ditandai dengan aktivitas ekonomi dan industri yang kuat umumnya menerapkan besaran upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang aktif. Akibatnya, situasi ini berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kemajuan pembangunan manusia di setiap wilayah tertentu. Di kabupaten Banjarnegara memiliki nilai upah minimum paling rendah yaitu sebesar Rp. 2.038.005,00 di tahun 2024, hal ini disebabkan perekonomian Banjarnegara masih didominasi oleh sektor pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta belum memiliki konsentrasi industri manufaktur besar seperti beberapa kabupaten lain di Jawa Tengah. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan perusahaan dalam membayar upah cenderung lebih rendah. Sedangkan kabupaten Demak menjadi kabupaten dengan upah minimum paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan besaran upah minimum sejumlah Rp. 2.761.236,00, karena didukung oleh pertumbuhan sektor industri dan manufaktur yang pesat. Banyak perusahaan di Demak bergerak di sektor industri, logistik, dan pengolahan yang memiliki produktivitas tinggi serta kemampuan membayar upah yang lebih besar.

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan terhadap upah minimum yang di suatu wilayah tertentu diharapkan mampu meningkatkan kondisi keuangan para pekerja, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi umumnya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang merupakan unsur-unsur mendasar dari IPM. Sehingga ketentuan mengenai upah minimum kabupaten memiliki potensi secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja di wilayah tertentu. Kondisi UMK di setiap kabupaten memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi, kemampuan

perusahaan, biaya hidup, serta karakteristik wilayah masing-masing daerah (Iswara & Astuti, 2024).

Wilayah yang menunjukkan keterlibatan ekonomi yang kuat umumnya memiliki tingkat Upah Minimum Daerah (UMK) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang aktivitas ekonominya relatif lebih rendah. Perbedaan tingkat UMK di antara wilayah-wilayah geografis yang berbeda ini dapat berkontribusi terhadap variasi kesejahteraan masyarakat dan standar pembangunan manusia di masing-masing wilayah. Penelitian sebelumnya oleh Ramadhan & Setyowati (2023) mengidentifikasi adanya korelasi positif yang signifikan antara UMK dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesimpulan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2025), yang menjelaskan pengaruh positif yang cukup besar yang diberikan oleh UMK terhadap IPM. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tria Resmana & Gunawan (2025), yang juga menyimpulkan bahwa UMK memberikan dampak positif yang signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, penelitian oleh Nailufar et al. (2024) melaporkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara upah minimum dan IPM.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mengukur proporsi penduduk usia dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, dan turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. TPAK yang tinggi menandakan adanya jumlah individu yang lebih besar yang berkontribusi terhadap output ekonomi, yang berpotensi mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Provinsi Jawa Tengah, TPAK menjadi salah satu indikator penting karena populasi usia kerja yang cukup besar dapat menjadi potensi dalam meningkatkan pembangunan manusia dan ekonomi. TPAK pada kabupaten di Jawa Tengah masih menunjukkan perbedaan. Beberapa daerah memiliki tingkat partisipasi yang tinggi karena didukung oleh sektor

industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang, sementara daerah lain memiliki tingkat partisipasi yang relatif rendah akibat terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup di masing-masing daerah. Masyarakat yang aktif bekerja biasanya memiliki pendapatan yang lebih baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Untuk melihat perkembangan TPAK pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, berikut disajikan data TPAK tahun 2021-2024:

**Tabel 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024**

NO	KABUPATEN	2021	2022	2023	2024
1	Cilacap	62,91	65,65	66,60	67,95
2	Banyumas	65,07	64,75	64,60	68,03
3	Purbalingga	69,52	73,47	73,45	74,47
4	Banjarnegara	69,76	72,17	71,64	73,38
5	Kebumen	67,76	71,57	74,54	77,37
6	Purworejo	73,29	72,38	74,76	73,72
7	Wonosobo	70,77	74,55	73,59	74,97
8	Magelang	75,78	79,57	79,45	77,72
9	Boyolali	75,79	75,51	74,73	75,25
10	Klaten	66,89	68,66	66,71	74,24
11	Sukoharjo	68,78	67,38	67,66	68,21
12	Wonogiri	73,09	74,87	82,45	77,75
13	Karanganyar	73,15	70,70	70,69	74,57
14	Sragen	71,74	69,40	68,60	74,54
15	Grobogan	72,88	72,05	75,81	76,56
16	Blora	70,54	75,08	78,02	73,51
17	Rembang	70,67	73,98	72,75	74,50

18	Pati	68,99	71,52	73,10	76,75
19	Kudus	74,77	70,99	72,19	75,53
20	Jepara	69,55	69,74	71,57	71,94
21	Demak	66,23	66,97	70,76	72,36
22	Semarang	74,10	75,42	76,07	79,29
23	Temanggung	74,01	76,14	75,80	78,06
24	Kendal	69,93	73,44	76,93	76,85
25	Batang	71,40	74,90	76,62	77,91
26	Pekalongan	71,46	70,40	70,46	76,38
27	Pemalang	65,90	69,91	69,58	72,24
28	Tegal	66,24	65,54	67,61	73,49
29	Brebes	63,97	66,01	66,10	71,92

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026)

Berdasarkan tabel 1.4 yang disajikan, dapat diketahui bahwa TPAK pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mengalami perbedaan pada setiap daerah selama tahun 2021-2024. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, kesejahteraan, dan kualitas pembangunan manusia di masing-masing wilayah. TPAK tertinggi ditempati oleh Kabupaten Magelang pada tahun 2022 dimana kondisi perekonomian di Magelang didukung oleh sektor pariwisata yang terus berkembang, terutama keberadaan kawasan wisata Candi Borobudur yang mendorong terciptanya berbagai peluang kerja di bidang akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Selain itu, letak Kabupaten Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta memudahkan mobilitas tenaga kerja serta memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja di wilayah sekitar. Sedangkan Cilacap menjadi Kabupaten yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja paling rendah dikarenakan banyaknya penduduk usia kerja yang belum aktif dalam pasar kerja terutama pada penduduk perempuan, di

Cilacap kebanyakan perempuan mengurus rumah tangga dan tidak berpartisipasi dalam dunia kerja, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan, dimana TPAK perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tidak seluruh penduduk usia kerja terlibat aktif dalam pasar kerja, sehingga TPAK Kabupaten Cilacap cenderung lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten lain di Jawa Tengah.

Dalam pembangunan daerah, tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu faktor produksi utama. Ketersediaan tenaga kerja yang aktif dan produktif dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan produksi ekonomi daerah. Meningkatnya peluang kerja serta kemampuan ekonomi lokal dalam menyerap tenaga kerja juga tercermin dari tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja. Sebaliknya, rendahnya TPAK dapat menunjukkan masih terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Solicha et al. (2024) memberikan gambaran bahwa hubungan antara variable TPAK dengan IPM bersifat kompleks dan saling memengaruhi.

Sejauh ini masih relatif sedikit penelitian yang secara bersamaan mengkaji pengaruh PDRB, UMK, dan TPAK terhadap IPM secara bersamaan dalam konteks waktu tertentu, khususnya di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2021-2024. Padahal, periode ini penting karena mencerminkan dinamika pemulihan sosial ekonomi pascapandemi dan perubahan struktur pasar kerja yang dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan regional. Penelitian yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris yang kuat mengenai kontribusi masing-masing variabel terhadap IPM serta menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih terarah guna meningkatkan

taraf hidup masyarakat Jawa Tengah. Dengan demikian, penelitian ini akan mengangkat judul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024.”

B. Rumusan Masalah

Perbedaan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar daerah diduga dipengaruhi oleh PDRB, upah minimum, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Dengan demikian, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum kabupaten, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Objek penelitian dibatasi pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak mencakup wilayah kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah
2. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2021-2024, karena rentang tahun tersebut merupakan situasi setelah terjadinya

pandemi Covid-19 yang merupakan masa pemulihan ekonomi di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, didapat beberapa tujuan dan manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024.
 - b. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024.
 - c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024.
 - d. Untuk menganalisis pengaruh simultan antara PDRB, upah minimum kabupaten, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021-2024.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam kajian ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh PDRB, upah minimum kabupaten, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan
 - 2) Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat berfungsi sebagai rujukan serta landasan bagi pengembangan studi selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam mendapatkn gambaran yang jelas, penulis telah menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

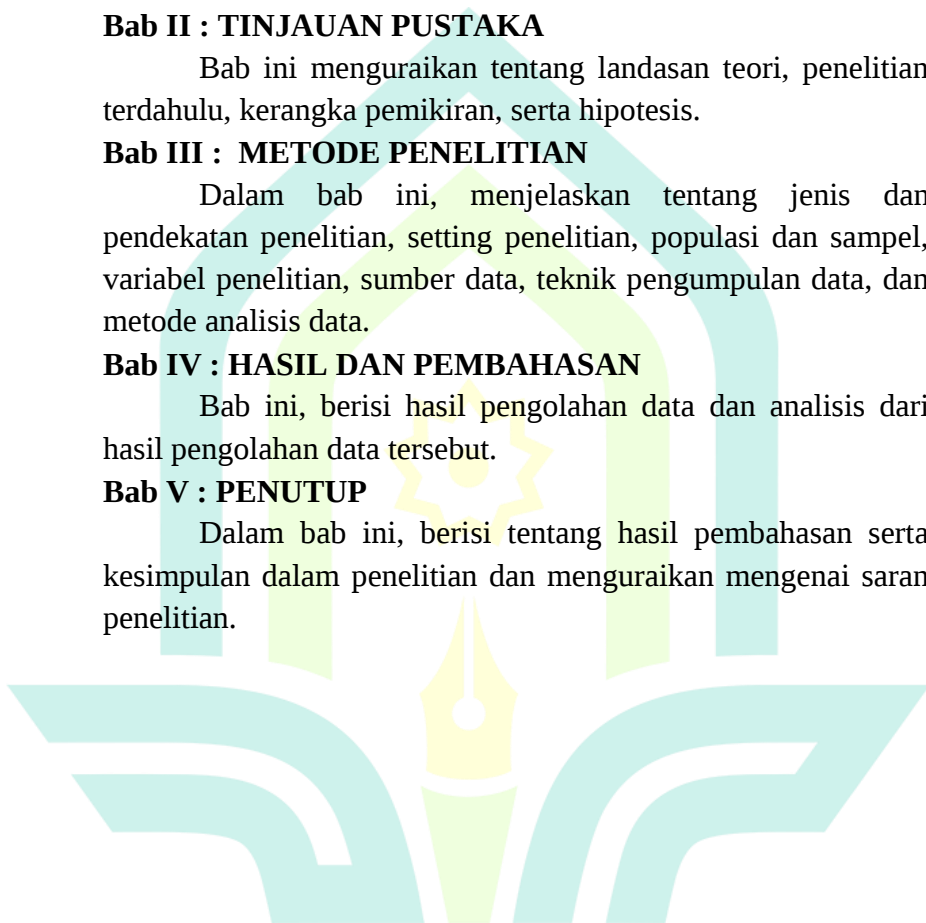
Dalam bab ini, menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini, berisi hasil pengolahan data dan analisis dari hasil pengolahan data tersebut.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini, berisi tentang hasil pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian dan menguraikan mengenai saran penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data dan analisis diatas tentang Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024 dihasilkan beberapa kesimpulan pada penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 ($<0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.
2. Upah Minimum Kabupaten berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia dengan nilai signifikansi sebesar 0,0001 ($<0,05$). Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat upah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya beli, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam Ideks Pembangunan Manusia.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai signifikansi sebesar 0,8770 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi angkatan kerja belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh masih rendahnya kualitas tenaga kerja, tingkat produktivitas yang

belum optimal, serta dominasi pekerjaan di sektor informal yang belum mampu memberikan kesejahteraan secara maksimal.

4. Hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 ($<0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dengan adanya peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta kesempatan kerja yang lebih luas, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat sehingga dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

B. Saran

1. Bagi Pemetintah

Diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor produktif, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan investasi daerah. Dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kebijakan pengupahan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak masyarakat, peningkatan UMK perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap pelaksanaanya agar kesejahteraan tenaga kerja meningkat dan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Bagi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap indeks pertumbuhan manusia, namun pemerintah tetap perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini penting agar tenaga kerja yang tersedia tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas dan

kompetensi yang mampu mendukung peningkatan produktivitas ekonomi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variable lain yang diduga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, seperti Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam menganalisis pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik sehingga hasil penelitian bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data yang dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-faruq, M. A. B. (2024). Pengaruh Modal Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *HATTAA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 1(April), 1–10.
- Amdah, M. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Melalui Model Regresi Linier Berganda. *LaGeografia*, 23(2), 120–129. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Auliya, M., Rahmah, M., Saharuddin, & Trisniarti, N. (2023). Pengaruh PDRB dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 110–116. <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i2.10323>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)* (Edisi Pert).
- Boediono. (2001). *Pengantar Ilmu Ekonomi no.2 Ekonomi Makro* (4th ed.). BPFE Yogyakarta.
- BPS. (2023). Indikator Ketenagakerjaan. *Badan Pusat Statistik Indonesia*, (March 2015).
- Egary, E. A., & Sofyan, S. (2024). Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009 – 2022 Di Dki Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 569–578.
- Firmansyah, A. H., & Wasil, M. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), 54–65. <https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.13048>
- Gede, A. D. M. Y. (2024). Determinan Kesejahteraan Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(2), 170–181. <https://doi.org/10.36985/jxhymn64>
- Hartono, M. F. I., & Khikmah, L. (2024). Analisis Faktor yang

- Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur 2021 Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(9), 3989–3995. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.3932>
- Iswara, A. I., & Astuti, I. P. (2024). Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2014-2023. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 173–184. <https://doi.org/10.23969/oikos.v8i2.13271>
- Izzah, C. I., & Hendarti, I. M. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. *Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 99–106.
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Karimi, K., & Nasution, I. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 13(April 2024), 66–78.
- Mailadani, D. A., & Rosintan, L. (2024). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 1990-2021. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.19358>
- Mariana, N., & Nabila, U. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Langkat. *Jurnal Gamma-Pi*, 3(2), 21–26. <https://doi.org/10.33059/jgp.v3i2.3684>
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40.
- Mauladi, A., & Rahmawati, F. N. (2023). Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 68–83. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.8945>
- Maulana, I., Salsabila, Z., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh Jumlah

- Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 164–170.
- Murtadho, I. (2023). Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 1(01), 35–42.
- Nailufar, F., Juliansyah, H., Murtala, & Risna. (2024). Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Penanaman Modal Asinng (PMA), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia (Studi Kasus 11 Provinsi IPM Lower Medium). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(1), 11–22.
- Nainggolan, L. E., Purba, B., Sudarmanto, E., Nainggolan, P., Hasibuan, A., Simarmata, H. M. P., & Damanik, D. (2021). *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (R. Watrianthos & J. Simarmata, Eds.). Yayasan Kita Menulis.
- Nastiti, A. W., & Nailufar, F. (2024). Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(3), 1. <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15178>
- Nopirin. (2000). *Buku Ekonomi Moneter II* (1st ed.). BPFE Yogyakarta.
- Nuroso, W., & Hidayat, R. (2024). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 89–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.18551>
- Permatasari, D., Winanto, A. R., & Abas, S. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2023. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 8(3), 1179–1188. <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.28267>
- Rahayu, S., Astuti, H., & Adianita, H. (2025). Analisis Tingkat

- Pendidikan, Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Analysis. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 8(1), 39–56.
- Ramadhan, B. A., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 82–89. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2065>
- Ritonga, R. K., & Rifai, A. (2023). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 7(4), 1320–1327. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.04.11>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sihobing, P. R. (2021). Analisis Regresi Data Panel. In *Penerbit Widina* (Number December).
- Solicha, F. A., Agustin, I. D., Efendi, S. P. W., Arisetyawan, K., & Nilasari, A. (2024). *Pengaruh IPM dan UMK Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Tengah*. 4, 60–67.
- Statistik, B. P. (2022). Produk domestik regional bruto. *Produk Domestik Regional Bruto*, 85–88.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2021). *Pembangunan Berorientasi Manusia: Suatu Analisis Kecenderungan dalam Pembangunan Nasional*. 32(3), 167–186.
- Sutranggono, D., Sujianto, A. E., Safitri, E., Prastiwi, N., Ayumazah, T., & Isnaini, V. (2023). Pengaruh Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur Periode 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Indonesia*, 2(02), 24–31. www.bps.go.id
- Tri Resmana, R., & Gunawan, R. (2025). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*

- Indonesia*, 3(2), 34–47. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1310>
- Yulikasari, & Samsuddin, M. A. (2025). *Analisis Dinamis Hubungan Antara Kepadatan Penduduk , PDRB Per Kapita , dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia*. 3.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-faruq, M. A. B. (2024). Pengaruh Modal Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *HATTAA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 1(April), 1–10.
- Amdah, M. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Melalui Model Regresi Linier Berganda. *LaGeografia*, 23(2), 120–129. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Auliya, M., Rahmah, M., Saharuddin, & Trisniarti, N. (2023). Pengaruh PDRB dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 110–116. <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i2.10323>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)* (Edisi Pert).
- Boediono. (2001). *Pengantar Ilmu Ekonomi no.2 Ekonomi Makro* (4th ed.). BPFE Yogyakarta.
- BPS. (2023). Indikator Ketenagakerjaan. *Badan Pusat Statistik Indonesia*, (March 2015).
- Egary, E. A., & Sofyan, S. (2024). Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009 – 2022 Di Dki Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 569–578.
- Firmansyah, A. H., & Wasil, M. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), 54–65. <https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.13048>
- Gede, A. D. M. Y. (2024). Determinan Kesejahteraan Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bali. *Jurnal*

- EkuiInomi*, 6(2), 170–181. <https://doi.org/10.36985/jxhymn64>
- Hartono, M. F. I., & Khikmah, L. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur 2021 Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(9), 3989–3995. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.3932>
- Iswara, A. I., & Astuti, I. P. (2024). Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2014-2023. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 173–184. <https://doi.org/10.23969/oikos.v8i2.13271>
- Izzah, C. I., & Hendarti, I. M. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. *Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 99–106.
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Karimi, K., & Nasution, I. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 13(April 2024), 66–78.
- Mailadani, D. A., & Rosintan, L. (2024). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 1990-2021. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.19358>
- Mariana, N., & Nabila, U. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Langkat. *Jurnal Gamma-Pi*, 3(2), 21–26. <https://doi.org/10.33059/jgp.v3i2.3684>
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40.
- Mauladi, A., & Rahmawati, F. N. (2023). Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 68–83.

<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.8945>

- Maulana, I., Salsabila, Z., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 164–170.
- Murtadho, I. (2023). Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 1(01), 35–42.
- Nailufar, F., Juliansyah, H., Murtala, & Risna. (2024). Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Penanaman Modal Asinng (PMA), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia (Studi Kasus 11 Provinsi IPM Lower Medium). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(1), 11–22.
- Nainggolan, L. E., Purba, B., Sudarmanto, E., Nainggolan, P., Hasibuan, A., Simarmata, H. M. P., & Damanik, D. (2021). *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (R. Watrionthos & J. Simarmata, Eds.). Yayasan Kita Menulis.
- Nastiti, A. W., & Nailufar, F. (2024). Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(3), 1. <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15178>
- Nopirin. (2000). *Buku Ekonomi Moneter II* (1st ed.). BPFE Yogyakarta.
- Nuroso, W., & Hidayat, R. (2024). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 89–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.18551>
- Permatasari, D., Winanto, A. R., & Abas, S. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2023. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 8(3), 1179–1188.

<https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.28267>

- Rahayu, S., Astuti, H., & Adianita, H. (2025). Analisis Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Analysis. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 8(1), 39–56.
- Ramadhan, B. A., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 82–89. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2065>
- Ritonga, R. K., & Rifai, A. (2023). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 7(4), 1320–1327. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.04.11>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sihobing, P. R. (2021). Analisis Regresi Data Panel. In *Penerbit Widina* (Number December).
- Solicha, F. A., Agustin, I. D., Efendi, S. P. W., Arisetyawan, K., & Nilasari, A. (2024). *Pengaruh IPM dan UMK Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Tengah*. 4, 60–67.
- Statistik, B. P. (2022). Produk domestik regional bruto. *Produk Domestik Regional Bruto*, 85–88.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2021). *Pembangunan Berorientasi Manusia: Suatu Analisis Kecenderungan dalam Pembangunan Nasional*. 32(3), 167–186.
- Sutranggono, D., Sujianto, A. E., Safitri, E., Prastiwi, N., Ayumazah, T., & Isnaini, V. (2023). Pengaruh Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur Periode 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Indonesia*, 2(02), 24–31. www.bps.go.id
- Tria Resmana, R., & Gunawan, R. (2025). Pengaruh Upah Minimum

Provinsi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 34–47. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1310>

Yulikasari, & Samsuddin, M. A. (2025). *Analisis Dinamis Hubungan Antara Kepadatan Penduduk , PDRB Per Kapita , dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia*. 3.

